

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan bencana dalam Undang–Undang No.24 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan bahwa bencana merupakan “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis”. Terjadinya bencana yang memberikan dampak kerugian baik dari segi manusia, lingkungan, harta benda bahkan dampak psikologi merupakan permasalahan yang membutuhkan perhatian serius dalam upaya penanggulangannya.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, pengertian mitigasi ialah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana, dimana tujuan utama mitigasi ialah untuk mengurangi atau bahkan meniadakan risiko dan dampak bencana. Selain itu, dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya bahaya untuk mengingatkan orang akan kemungkinan bahaya serta mengantisipasi

adanya dampak yang terlalu besar melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Paramesti, 2011) .

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tugas dari BPBD sendiri yaitu, *Pertama* menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan Darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara. *Kedua*, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. *Ketiga*, Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. *Keempat*, menyusun dan menetapkan prosedur penanggulangan bencana. *Kelima*, Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. *Keenam*, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. *Ketujuh*, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Kedelapan*, pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan (BPBD, 2022).

Pada proses implementasi kebijakan pemerintahan diperlukan faktor atau pendukung yang dapat membuat proses implementasi berjalan dengan lancar. Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut adalah bagaimana pemerintahan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Menurut (Susanto, 2011) pada penelitian (Kuncoro & Indrawati, 2019) menyatakan bahwa dalam penanggulangan bencana, komunikasi merupakan suatu proses yang penting. Hal ini dimaksudkan agar seluruh *stakeholders* yang terlibat dapat mereduksi ketidakpastian dan memastikan agar setiap *stakeholders* dapat bertindak secara efektif, dalam proses interaksi yang dilakukan individu maupun kelompok. Komunikasi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana memerlukan komunikasi yang mudah diakses serta dapat tersampaikan dengan cepat kepada masyarakat dan pihak terlibat. Menurut Harold D. Lasswell dalam (Kusuma, 2010) komunikasi merupakan suatu proses transmisi pesan. Komunikasi juga sebuah proses penyampaian pesan yang mempunyai sifat satu arah dari komunikator (penyampai pesan) kepada sang komunikan (penerima pesan) dengan menggunakan suatu media tertentu sehingga dapat menimbulkan efek.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data dari badan pusat stastistika wilayah Kabupaten Bantul merupakan wilayah terbesar jika dibandingkan kabupaten lain dan mempunyai penduduk terbanyak nomer dua setelah Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk pada Kabupaten bantul

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2020 adalah sebesar 3.668.719 orang. Namun disisi lain menurut peta rawan bencana BPBD DIY Kabupaten Bantul juga menjadi daerah lokasi yang memiliki tingkat rawan bencana yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya.

Menurut data dari BPBD Kabupaten Bantul yang disampaikan oleh bapak Eta Nur Efendi selaku staf pusdalops diperoleh data bahwa ada 10 jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bantul. Namun ada 3 jenis bencana yang secara rutin terjadi, dan yang mana jumlahnya relatif banyak di Kabupaten Bantul, yaitu: tanah longsor, kebakaran dan pohon tumbang. Total kejadian bencana di Kabupaten Bantul pada rentan waktu 2015 hingga 2020 berturut-turut sebanyak 2.508 kejadian. Pada tahun 2015 terdapat 161 kejadian, tahun 2016 290 kejadian, tahun 2017 572 kejadian, tahun 2018 356 kejadian, tahun 2019 559 kejadian dan pada tahun 2020 ada 570 kejadian. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2015-2017 total kejadian pertahunnya selalu meningkat hampir dua kali lipat. Di tahun 2018 kejadian mengalami penurunan yang bagus, namun pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebanyak 214 kejadian. Rentang selama 6 tahun terakhir ini, kejadian tanah longsor, kebakaran dan pohon tumbang merupakan kejadian yang paling banyak terjadi di Kabupaten Bantul. Tercatat sebanyak 827 kejadian tanah longsor, 929 kejadian kebakaran dan 397 kejadian pohon tumbang (BPBD Bantul, 2021).

Adapun langkah-langkah Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang sudah dilakukan di Kabupaten Bantul diantaranya pemasangan sirine *early*

warning score (EWS) di sepanjang pesisir selatan, pembuatan peta bahaya, sosialisasi di tingkat komunitas, sosialisasi di sekolah, memfasilitasi masyarakat menyusun SOP desa, RT dan Keluarga, membentuk kelompok-kelompok PRB di masyarakat, membuat jalur evakuasi bersama masyarakat, pemasangan rambu-rambu petunjuk arah evakuasi, penguatan Kelembagaan BPBD (bantulkab.go.id, 2009). Namun, ternyata masih banyak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana, seperti akibat cuaca ekstrim ada beberapa ambrolnya jembatan, pohon tumbang mengenai jaringan listrik, tertutupnya akses jalan raya, rusaknya lahan-lahan pertanian, grepes dan longsor di sisi jalan (Antaraneews.com, 2022). Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Bambang Nugroho selaku sub koordinasi pencegahan bencana BPBD Kabupaten Bantul, beliau mengatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah melakukan pencegahan bencana terhadap masyarakat Kabupaten Bantul seperti sosialisasi, pemasangan sirine di daerah pesisir, pemasangan baliho di pinggir jalan serta grup WhatsApp (WA), tetapi terdapat permasalahan dalam proses sosialisasi serta penyampain informasi dalam grup WhatsApp (WA).

Bambang Nugroho selaku Kepala Sub Koordinasi Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Bantul mengatakan bahwa terdapat poin permasalahan yang terjadi berupa penyampain informasi secara digital yang kurang luas dan efektif, hal ini disebabkan karena informasi yang di sampaikan masih disebar luaskan melalui grup WhatsApp (WA), dimana

grup tersebut hanya diikuti oleh anggota internal saja. Cara penyebaran informasi yang demikian dirasa kurang efektif dikarenakan anggota internal hanya akan menyebarkan informasi melalui media sosial milik pribadi, sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat mengetahui informasi tersebut. (Kuncoro & Indrawati, 2019). Dari pemaparan masalah yang ada, pada Kabupaten Bantul terdapat adanya permasalahan mengenai komunikasi pemerintah berbasis digital, yang mana pada era sekarang hampir setiap orang mempunyai *smartphone* canggih. Disisi lain, permasalahan terkait komunikasi juga terjadi pada respon masyarakat dalam penerimaan informasi yang disampaikan oleh BPBD, masih terdapatnya masyarakat yang acuh atau kurang peduli terhadap informasi yang disampaikan mengenai pencegahan bencana merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan yang baik, hal ini dikarenakan respon masyarakat mempunyai peranan penting terhadap tingkat keberhasilan BPBD dalam memberikan informasi pencegahan bencana. Maka dari itu antar *stakeholders* harus mempunyai komunikasi yang baik agar suatu kebijakan atau tujuan dapat berjalan dengan efektif

Komunikasi merupakan poin penting dari adanya kebijakan dan perencanaan serta tujuan tertentu. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka suatu kebijakan tidak terlaksanakan dengan baik juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah. Contohnya seperti ketika pemerintah tidak memberikan informasi yang baik dan jelas maka masyarakat tidak dapat

menangkap informasi tersebut dengan baik juga. Tidak hanya itu, komunikasi juga sangat penting dalam penanggulangan bencana. Tumpang tindihnya informasi kebencanaan yang diterima oleh masyarakat bisa mengakibatkan berita yang tidak bertanggung jawab dan akan meresahkan masyarakat yang terdampak. Maka untuk dapat mencapai hasil yang maksimal BPBD sebagai tanggung jawab terhadap situasi dan kondisi darurat bencana Kabupaten Bantul perlu menyusun desain komunikasi berbasis digital yang tepat untuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kuncoro & Indrawati, 2019). Maka dari arti penting komunikasi dalam suatu kebijakan serta proses penanggulangan bencana, dari sinilah penelitian ini mengkaji **“Desain Komunikasi Pemerintahan Berbasis Digital Dalam Upaya Kesiapsiagaan Bencana di Kabupaten Bantul”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan masalah bahwa penyebaran informasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Bantul dalam konteks kesiapsiagaan bencana hanya dilakukan melalui grup WhatsApp (WA) dan hanya melibatkan anggota internal saja. Hal ini menjadi masalah karena komunikasi yang dilakukan BPBD terkait kesiapsiagaan bencana tidak menjangkau masyarakat Kabupaten Bantul. Padahal BPBD memiliki tanggungjawab dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Bantul.

Lebih daripada itu, akibat dari masalah komunikasi yang tidak efektif dari BPBD Bantul dalam menyampaikan informasi. Respon dari masyarakat Bantul juga menjadi persoalan, karena muncul ketidakpedulian dengan informasi yang disampaikan BPBD tersebut. Maka daripada itu muncul rumusan masalah penelitian ini, Bagaimanakah desain komunikasi pemerintahan berbasis digital dalam upaya kesiapsiagaan bencana Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apakah desain komunikasi pemerintahan berbasis digital dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian studi ilmu pemerintahan, khususnya mengenai desain komunikasi pemerintahan berbasis digital dalam kesiapsiagaan bencana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi, masukan, dan pertimbangan kepada pihak-pihak terkait dalam desain komunikasi pemerintahan berbasis digital dalam kesiapsiagaan bencana.

E. Kajian Pustaka

Peneliti terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, kegunaannya untuk mengetahui sisi yang menarik dalam

penelitian dan mengklasifikasi perbedaan atau persamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan sekarang. Dalam penelitian ini menggunakan 30 artikel jurnal yang relevan dengan membahas tentang Desain komunikasi pemerintahan berbasis digital dalam upaya kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan 30 artikel jurnal terdapat 4 artikel yang membahas mengenai komunikasi pemerintah dalam penanggulangan resiko bencana. Penelitian dari (Rianti & Esfandari, 2019) menjelaskan bahwa dengan adanya penambahan penyuluhan, sosialisasi dan pengoptimalkan sosial media dan website diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan lebih *aware* untuk pencegahan bencana. Hal tersebut di dukung Penelitian oleh (Syafuddin, 2019) dalam menjalankan fungsi manajemen informasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), yaitu mengumpulkan isu-isu di masyarakat, membuat konten untuk disebarakan kepada masyarakat, serta *buzzer* yang menyebarkan informasi tersebut. Hal tersebut saling memiliki keterikatan yang kemudian membentuk sebuah siklus yang terus berputar. Dari siklus ini peneliti melihat bahwa tahapan dari manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), organisasi (*organizing*), penggiatan (*actuating*), hingga pengawasan dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan pola yang teratur dan baik.

Berbeda dengan penemuan (Badri, 2018) Paradigma sistem komunikasi dalam penanganan bencana harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat dibandingkan memberikan bantuan sesaat (*charity*). Sebagai sebuah sistem, antareleman (*subsistem*) harus saling terkait dan berkoordinasi dalam penanganan

pasca bencana mulai tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Penelitian oleh (Ginting & Simamora, 2020) menuliskan bahwa dalam strategi pengkajian pesan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersifat edukasi dan pemilihan media komunikasi yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu berupa, media luar ruangan berupa spanduk, baliho, dan umbul-umbul, dan media baru berupa media sosial facebook dan WA group.

Kemudian, terdapat 10 artikel yang membahas tentang kesiapsiagaan institusi pemerintahan untuk menanggulangi bencana. Seperti yang telah dituliskan oleh (Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin, 2019) dan (Ristiani, 2020) bahwa peran BPBD pada saat prabencana dengan mengadakan sosialisasi dan kajian-kajian serta membuat peta rawan bencana sehingga dapat mengetahui potensi bencana dan dapat meminimalisir adanya korban jiwa maupun, pada saat bencana BPBD membantu pertolongan, pemberian hunian sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan kebutuhan air bersih dan BPBD juga memiliki strategi kesiapsiagaan yang tertuang pada Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (RENSTRA SKPD). Sama dengan yang di tuliskan oleh (Masry, 2016) dan (Prasanti & Fuady, 2018) bahwa untuk kesiapan dan antisipasi ancaman bahaya bencana, menjadi keharusan bagi pemerintah pada wilayah terdampak untuk menyiapkan segera langkah prefentif dan antisipatif, salah satunya dengan melakukan penyusunan perencanaan manajemen komunikasi krisis termasuk seluruh sarana dan prasarana pendukungnya. Sehingga jika bencana betul-betul terjadi aparaturn pemerintahan maupun publik telah siap dengan langkah-

langkah antisipatif yang harus dilakukan. Perlu juga meningkatkan efektivitas jaringan komunikasi risiko, yaitu diperlukannya pola jaringan komunikasi yang lebih intensif lagi, khususnya dalam menghubungkan semua anggota masyarakat

Hal tersebut didukung oleh penelitian (Prasanti & Fuady, 2017) yang menyatakan bahwa dalam kesiapan menghadapi bencana seperti: Penentuan aparat desa/ tokoh masyarakat sebagai komunikator/sumber yang kredibel, Pemilihan pesan yang mudah diterima oleh masyarakat, Pemahaman karakteristik masyarakat desa, Mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi selama pelaksanaan strategi komunikasi. Peneliti (Sosiawan et al., 2011) juga menuliskan bahwa Dalam pengelolaan bencana alam masing-masing lembaga pemerintahan melalui kebijakan pimpinan daerah memiliki kewenangan yang luas dan mampu langsung mengakses ke wilayah yang menjadi korban bencana atau masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

Berbeda dengan penelitian (Huda, 2019) yang menuliskan bahwa Model strategi pembelajaran kebencanaan sejak usia dini dengan sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana melalui jalur pendidikan sebagai aset penerus. Hal ini merupakan usaha untuk pengembangan modal sosial di kawasan rawan bencana. Tetapi hal itu dibantah oleh penelitian (Rahmat et al., 2021) dan (Rohayati & Alhidayatillah, 2020) menuliskan bahwa pemerintah telah mengatur tentang penanggulangan bencana dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013. Di dalam peraturan daerah tersebut juga disebutkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana negara dilimpahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kemudian penyelenggaraan di

daerah dilimpahkan kepada BPBD setempat yaitu BPBD. Tetapi hal tersebut berbeda dengan temuan penelitian oleh (Iqbal et al., 2021) bahwa komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum dilakukan secara maksimal karena tidak menjadi prioritas utama sehingga tidak memiliki pola yang jelas dalam komunikasi mitigasi bencana, walaupun sudah mengadakan program mitigasi.

Kemudian terdapat 13 artikel yang membahas tentang gerakan mitigasi bencana. Seperti yang telah dituliskan oleh (Dwivayani & Boer, 2020) dan (Abdillah et al., 2022) yang menyampaikan tereduksinya agen mitigasi bencana akan membawa pengaruh positif untuk mendifusikan (menyebarkan) informasi selanjutnya kepada masyarakat luas, sehingga dapat meminimalkan dampak dari sebuah bencana. Sama dengan yang dituliskan oleh (Basir, 2019) dan (Lomban & Jamalullail, 2022) Strategi BPBD dalam Penanggulangan Bencana dapat dilakukan dengan menerapkan memanfaatkan anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat, Meningkatkan kerjasama dengan antar daerah, menambah jumlah pegawai, meningkatkan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana, Meningkatkan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, serta mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur BPBD, dan meningkatkan jumlah Tim Reaksi Cepat.

Penelitian (F. A. Lestari et al., 2017) juga menuliskan bahwa terdapat bentuk komunikasi masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana yaitu, radio komunitas dan sosialisasi secara informal. Ketika ada informasi mengenai kenaikan status menjadi AWAS, masyarakat secara mandiri melakukan kegiatan evakuasi. Hal ini juga mendukung dalam upaya pengurangan risiko bencana. Hal

tersebut diperkuat dengan penelitian oleh (Nurdin, 2015) yang menuliskan bahwa informasi berlimpah saja tidak cukup untuk menyadarkan warga atas bahaya bencana yang mengancam. Cara menyampaikan informasi juga harus dilakukan dengan tepat. Kekeliruan dalam mengkomunikasikan sebuah informasi, bisa menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk situasi.

Sedangkan penelitian (Wardyaningrum & Bustan, 2019) menuliskan kesiapsiagaan bencana kepada siswa SD lebih efektif dilakukan melalui konseling kelompok dengan pendekatan permainan kelompok, drama musikal, dan pentas seni. Dari konseling melalui komunikasi kelompok. Didukung oleh penelitian (Winoto et al., 2017) dan (Marina et al., 2021) yang menuliskan bahwa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang bahaya bencana, maka peran masyarakat perlu didorong lagi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Penelitian oleh (Murliana et al., 2020) dan (Syahara et al., 2021) menuliskan bahwa pendekatan budaya dapat diterima dengan baik dan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya persepsi kepercayaan, nilai, dan sikap yang dianut oleh masyarakat. Sama dengan yang dituliskan oleh (Gusti Ayu Agung Putri Utami, 2017) bahwa dari sisi kepercayaan masyarakat memiliki kepercayaan tentang turunnya binatang gunung sebagai pemberi petunjuk akan adanya marabahaya.

Tetapi hal tersebut dibantah penelitian oleh (Kholil et al., 2019) yang menuliskan bahwa pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi saat terjadi bencana gempa bumi sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi, guna melakukan tindakan penyelamatan. bencana penyampaian

informasi secara benar, cepat dan akurat kepada masyarakat melalui media sosial (terutama WA).

Selanjutnya terdapat 3 jurnal yang membahas tentang pendidikan masyarakat mengenai mitigasi bencana. Seperti penelitian oleh (Bakti et al., 2017) yang menuliskan bahwa peran perempuan dalam penanggulangan bencana yang berkaitan dengan Majelis Ta'lim, kelompok arisan, kelompok PKK. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kebersihan lingkungan dengan alasan sebagai akses/jalan masuk bagi pelaku kebersihan lingkungan dalam menyampaikan pesan-pesan lingkungan dan mendidik masyarakat, terutama perempuan untuk dapat memanfaatkan limbah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Penelitian (Minanto & Ningsih, 2018) dan (Andhika, 2018) juga mengatakan bahwa dengan melalui media baru dan pola pendidikan sekolah komunitas, kesadaran tentang risiko bencana dapat dimiliki oleh warga.

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

| No | Klasifikasi Tema | Hasil Penelitian |
|----|---|--|
| 1 | Komunikasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Resiko Bencana | (Rianti & Esfandari, 2019), (Syafuddin, 2019), (Badri, 2018) dan (Ginting & Simamora, 2020) menjelaskan bahwa dengan adanya penambahan sosialisasi dan |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>pengoptimalkan sosial media dan website diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi untuk pencegahan bencana. Adapun Media luar ruangan berupa spanduk, baliho dan umbul-umbul.</p> |
| 2 | <p>Kesiapsiagaan Institusi Pemerintahan untuk Menanggulangi Bencana</p> | <p>(Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin, 2019), (Ristiani, 2020), (Masry, 2016), (Prasanti & Fuady, 2017), (Huda, 2019), (Sosiawan et al., 2011), (Rahmat et al., 2021), (Rohayati & Alhidayatillah, 2020) (Iqbal et al., 2021) dan (Prasanti & Fuady, 2018) menjelaskan bahwa pada saat prabencana BPBD dapat mengadakan sosialisasi dan kajian- kajian dan membuat peta rawan bencana sehingga dapat mengetahui potensi bencana dan dapat meminimalisir adanya korban jiwa dan pada saat bencana BPBD membantu pertolongan, penyelamatan ,pemberian hunian sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan kebutuhan air bersih dan BPBD juga memiliki strategi kesiapsiagaan yang tertuang</p> |

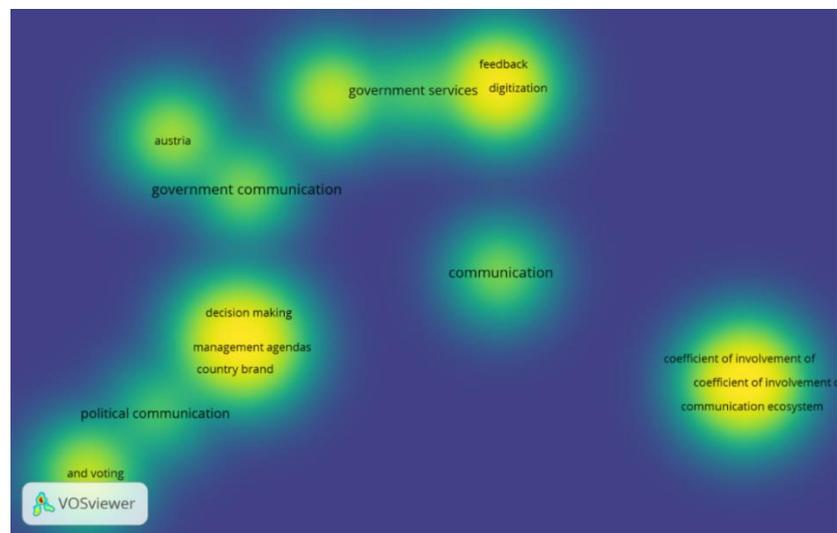
| | | |
|---|--------------------------|---|
| | | pada Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. |
| 3 | Gerakan Mitigasi Bencana | (Dwivayani & Boer, 2020) , (Abdillah et al., 2022), (Basir, 2019), (F. A. Lestari et al., 2017), (Wardyaningrum & Bustan, 2019), (Winoto et al., 2017), (Nurdin, 2015), (Murliana et al., 2020), (Marina et al., 2021), (Lomban & Jamalullail, 2022), (Bakti et al., 2017), (Syahara et al., 2021) dan (Gusti Ayu Agung Putri Utami, 2017) menjelaskan bahwa tereduksinya agen mitigasi bencana akan membawa pengaruh positif untuk mendifusikan (menyebarkan) informasi selanjutnya kepada masyarakat luas, sehingga dapat meminimalkan dampak dari sebuah bencana. Selain itu Strategi BPBD dilakukan dengan menerapkan memanfaatkan anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat, meningkatkan kerjasama dengan antar daerah, menambah jumlah pegawai, meningkatkan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana, meningkatkan komunikasi yang baik dengan pemerintah |

| | | |
|----|---|--|
| | | pusat dan juga mendorong berkembangannya tanggun jawab aparatur BPBD, meningkatkan jumlah Tim Reaksi Cepat. |
| 4. | Pendidikan Masyarakat Mengenai Mitigasi Bencana | (Bakti et al., 2017), (Minanto & Ningsih, 2018), dan (Andhika, 2018) menjelaskan bahwa melalui pendidikan sekolah komunitas di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana dan guna penyampaian informasi secara benar serta akurat |

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yang mana 4 artikel jurnal membahas tentang komunikasi pemerintah dalam penanggulangan resiko bencana, 10 artikel jurnal membahas tentang kesiapsiagaan institusi pemerintahan untuk menanggulangi bencana, 13 artikel jurnal membahas tentang gerakan mitigasi bencana dan yang terakhir 3 artikel jurnal yang membahas tentang pendidikan masyarakat mengenai mitigasi bencana. Namun dari empat topik tersebut belum ada secara komprehensif penelitian yang menjelaskan mengenai desain komunikasi pemerintahan berbasis digital dalam upaya kesiapsiagaan bencana. Maka penelitian ini akan berfokus pada desain komunikasi pemerintahan berbasis digital dalam upaya kesiapsiagaan bencana dengan studi kasus di Kabupaten Bantul.

Selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan software vosviewer untuk menampilkan literature review. Vosviewrs dipergunakan untuk menampilkan kebaharuan penelitian, pada literature review ini menggunakan sebanyak 30 artikel jurnal yang mana diambil dari 7 tahun terakhir. Berikut blibliometrik dari jurnal-jurnal yang telah saya olah melalui software vosviewers:

Gambar 1.1 Visualisasi Vosviewers



Sumber : Data Diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan gambar yang telah saya sajikan di atas bahwa keyword berwarna kuning menandakan banyaknya penelitian yang menyongsong tema tersebut, namun sebaliknya jika keyword berwarna hijau maka memiliki peluang untuk diteliti. Untuk keyword *feedback*, *digitization*, *government sevices*, *coefflcient of involvement of*, *communicatin ecosystem*, *Austria*, *decision making*, *management agendas*, *country brand* and *voting* keyword berwarna kuning brarti menandakan jika sudah banyaknya penelitian sebelumnya. Sedangkan *government*

communicatin, communicaton dan political communication berwarna hijau yang berarti menandakan jika masih kurangnya penelitian yang membahas tentang *government communication*. Maka dari itu pada penelitian ini menggunakan *keyword* ”*government communication*” sebagai bahan penelitian.

F. Kerangka Teori

1. Komunikasi Pemerintah

a) Pengertian komunikasi pemerintah

Para pakar komunikasi telah memberikan gambaran yang beragam tentang definisi komunikasi. Menurut Harold D. Lasswell dalam (Kusuma, 2010) komunikasi merupakan suatu proses transmisi pesan. Komunikasi juga sebuah proses penyampaian pesan yang mempunyai sifat satu arah dari komunikator (penyampai pesan) kepada sang komunikan (penerima pesan) dengan menggunakan suatu media tertentu sehingga dapat menimbulkan efek. Pengertian yg lain juga disampaikan oleh Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss yang mengatakan bahwa komunikasi tidak hanya sebatas konseptualisasi satu arah saja, tetapi juga merupakan suatu proses interaksi (dua arah), atau transaksi. Komunikasi bisa dikatakan efektif apabila makna yang diterima seorang komunikan (penerima pesan) sama dengan makna pesan yang disampaikan oleh komunikator (penyampai pesan).

Munculnya komunikasi sendiri didasari oleh adanya kebutuhan untuk meminimalisir ketidakpastian, agar dapat bertindak secara efektif demi melindungi dan memperkuat sangkutannya dengan berinteraksi secara individu maupun kelompok (Tamitiadini et al., 2019). Dalam penerapan komunikasi pemerintah dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pada penelitian ini menggunakan prespektif yang berkaitan dengan kebencanaan, dimana prekpektif kebencanaan berhubungan dengan bagaimana pemerintah menyampaikan informasi mengenai kebencanaan kepada masyarakat. Menurut (P. Lestari et al., 2021) komunikasi bencana memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan yang perlu dipersiapkan dalam hal tindakan dan perlakuan ketika akan terjadinya bencana. Sedangkan Menurut Haddow dan Haddow (2008) dalam (P. Lestari et al., 2021) komunikasi bencana merupakan interaksi komunikatif untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan daya tanggap masyarakat, yang pada penerapannya terdapat terdapat 5 landasan utama dalam membangun komunikasi bencana dengan efektif sebagai berikut :

- 1) Fokus Pelanggan (*Costumer Focus*)

Memahami informasi apa yang diperlukan oleh pelanggan (masyarakat atau relawan) dengan

menggunakan komunikasi yang menjamin ketepatan dan keakuratan informasi. Informasi yang diberikan dapat berupa ancaman bahaya, tingkat kemungkinan terjadinya bahaya serta berapa besar skala dampaknya.

2) Komitmen Kepemimpinan (*Leadership Commitment*)

Seorang pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat harus memiliki komitmen dalam halnya untuk melakukan komunikasi yang efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi.

3) Proses komunikais dan sistem perencanaan (*Inclusion Of Communication Is In Planningand Operations*)

Dalam komunikasi semua peran penting harus ikut terlibat dalam semua perencanaan dan operasi darurat. Hal ini untuk memastikan bahwa mengomunikasikan informasi yang tepat dan akurat harus melalui pertimbangan saat keputusan tindakan diperimbangkan.

4) Kesadaran Lingkungan (*Situational Awarness*)

Komunikasi yang efektif perlu didasari dengan pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi

terkait dengan bencana. Prinsip komunikasi efektif seperti transparansi dan dapat dipercaya menjadi kunci, yang mana informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kejadian yang terjadi di sekitar wilayah tersebut.

5) Media Kerjasama (*Media Patnership*)

Media yang cukup efektif, tepat serta sangat penting untuk menyampaikan informasi kepada publik seperti radio, televisi, surat kabar dan lainnya. Kerjasama yang menyangkut kesepahaman tentang kebutuhan media dengan tim yang telatih untuk mendapatkan informasi dan menyebarkannya kepada publik, yang mana media tersebut dapat dikelola oleh masyarakat wilayah setempat.

Menurut (Hasan, 2005) komunikasi bisa terjadi dalam berbagai lingkup hidup, salah satunya dalam konteks interaksi pemerintahan dan masyarakat. Maka dari itu muncullah konsep komunikasi pemerintahan, yang mana bisa diartikan sebagai penyampaian ide, program serta gagasan pemerintah untuk masyarakat dalam aspek mencapai tujuan negara (Rahmawati, 2020). Dalam penyampaian ide, program serta gagasan keduanya dapat menjadi komunikator dimana apabila pemerintah sebagai penyampai informasi dan masyarakat akan

menjadi komunikator apabila masyarakat sebagai pengaggas ide.

Menurut (Malone, 1997: 170) dalam (Silalahi, 2004) Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari kontek komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (*sharing ideas*), instruksi (*instruction*), atau perasaan-perasaan (*feelings*) berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah.

Komunikasi pemerintah, pemerintah diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam keadaan tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada dalam posisi penyampai ide dan pemerintah berada pada posisi untuk mengamati apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam keadaan seperti itu pemerintah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk

menanggapi keinginan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Septian, 2018).

b) Proses komunikasi pemerintah

Dalam (Erliana, 2014) menuliskan bahwa pada proses komunikasi harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut. (1) adanya komunikator (*communicator*). (2) adanya pesan yang sudah dikemas atau enensi komunikasi (*interaction*). (3) adanya interaksi langsung maupun maupun tidak langsung (*interaction*). (4) penggunaan media komunikasi yang benar dan tepat serta efisien (*the use of media*). (5) adanya pemahaman bersama akan esensi dan tujuan berkomunikasi (*mutual understanding*) atau adanya komunikan (*communicant*). (6) upan balik (*feed back*) yang terakhir (7) tumbuhnya kepercayaan (*trust*).

Proses komunikasi yang lain disampaikan oleh (Silalahi, 2004) yang mengatakan bahwa proses komunikasi pemerintah diawali oleh pengirim (administrator atau manajer pemerintah) dengan cara berkomunikasi dengan aparatur birokrasi, organisasi serta masyarakat. Maka dari itu harus ada seperangkat informasi sebagai pesan yang akan dikirimkan (*indeation*). Ketika mengirim informasi, pengirim harus memakai cara penyampaian informasi dengan menggunakan kata, tanda, atau lambang yang baik dan tepat. Hal ini diharapkan agar penerima dapat menerima

atau memahami informasi tersebut dan memberikan efek kepada orang lain. Selain itu gagasan dan ide yang berbentuk verbal (lisan dan tulisan), serta nonverbal (bahasa, isyarat, gambar, ekspresi dan gambar) merupakan pesan (*message*). Pesan yang disampaikan dapat berupa kebijakan, prosedur, peraturan serta keputusan-keputusan.

Proses komunikasi merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian dan tidak boleh dikesampingkan. Bisa dikatakan bahwa komunikasi sangat penting adanya, yang mana proses komunikasi dapat me mengontrol suatu organisasi atau individu yang terlibat dalam sebuah kepentingan (Kuncoro & Indrawati, 2019). Terjadinya proses komunikasi yang baik serta efektif akan menimbulkan dampak pada terciptanya sebuah koordinasi dan keterpaduan yang saling mendukung diantara banyak pihak yang bersangkutan. Selain itu koordinasi dan keterpaduan yang terjalin dalam proses komunikasi akan berdampak juga pada terciptanya sebuah kerjasama tim yang baik.

c) Peran komunikasi pemerintah

Komunikasi pemerintah sangat berperan penting dalam pembangunan di daerah. Hal ini dilandaskan berdasarkan kepada suatu anggapan dasar bahwa setiap kebijakan yang dilaksanakan di suatu daerah merupakan atas dasar pengarahan dari komunikasi pemerintah kepada masyarakat di setiap daerah

tersebut (Fabiana Meijon Fadul, 2019b). Sedangkan menurut (Mustanir, A.; Ramadhan, Muhammad Rohady.; Razak, Muhammad Rais Rahmat; Lukman; Tajuddin, 2019) peran pemerintah merupakan pihak pertama dan berada di tingkat pusat daerah yang berperan sebagai stakeholders paling utama dari e-Government. Yang mana pemerintah sebagai pihak yang menentukan tujuan, kebijakan, standar, dan pola kerja dari segala yang berkaitan dengan perencanaan, penerapan, dan pengembangan konsep dari e-Government. Dengan kata lain, pemerintah mempunyai kewajiban untuk membentuk lingkungan yang kondusif agar implementasi dari sistem e-Government dapat terlaksana dengan tepat.

d) Fungsi komunikasi pemerintahan

Menurut (Rugian et al., 2020) fungsi komunikasi pemerintahan merupakan suatu hal terpenting dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan public, yang mana harus baik dan terukur. Termasuk juga dalam halnya menanggulangi saat adanya bencana, yang mana harus memperhatikan terkait dengan penyampaian pesan, media dan saluran komunikasi, pendekatan komunikasi yang tepat dan koordinasi dengan semua pihak dalam menangani permasalahan mengenai bencana. Sedangkan menurut (Silalahi, 2004) Fungsi komunikasi dalam suatu organisasi, termasuk

organisasi pemerintah yaitu: *Pertama* fungsi informatif, komunikasi dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi dan kemudian menyebarkannya kepada pihak yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal. *Kedua*, regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Regulasi dibuat melalui proses komunikasi oleh orang-orang yang berada dalam posisi otoritas pembuat regulasi. *Ketiga*, persuasive, sebagai suatu cara melalui komunikasi dilakukan persuasi kepada orang lain sehingga mereka menerima pesan dan melaksanakannya dengan cara sukarela, tanpa paksaan atau dipaksa.

2. Kesiapsiagaan Bencana

a) Pengertian kesiapsiagaan

Menurut (Ferianto & Hidayati, 2019) kesiapsiagaan adalah suatu proses dari bagian manajemen bencana. Kesiapsiagaan merupakan sebuah elemen yang sangat penting dari kegiatan pencegahan pengurangan resiko bencana yang mempunyai sifat pro-aktif sebelum terjadinya suatu bencana. Pengertian lain juga disampaikan oleh (Paramesti, 2011) yang menuliskan bahwa kesiapsiagaan adalah kegiatan serta langkah yang akan dilakukan sebelum terjadinya bahaya alam yang mana hal tersebut untuk meramalkan atau mengingatkan orang lain akan

kemungkinan datangnya kejadian bahaya, mengevaluasi orang lain serta harta benda jika ada yang terancam bencana.

Kesiapsiagaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi, perorangan, instansi pemerintahan untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko bencana yang dapat berupa pengetahuan serta sikap tanggap darurat yang dimiliki seseorang tersebut (Rosida & Adi, 2017). Kesiapsiagaan bencana menurut (Nopiyanto, 2021) merupakan aktivitas yang dilakukan secara efektif dalam mengurangi tingkat korban bencana. (Azzahra et al., 2021) juga mengatakan bahwa kesiapsiagaan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen resiko bencana yaitu tahapan pra bencana. Kesiapsiagaan dilakukan pengorganisasian dan langkah yang tepat guna untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Pada tahap kesiapsiagaan merupakan tahap yang paling strategis untuk menentukan bagaimana ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.

Kesiapsiagaan merupakan suatu kesiapan untuk merancang suatu sistem, sehingga jika terjadi bencana maka semua pihak baik itu individu, keluarga, masyarakat dan para petugas yang terkait telah siap untuk menghadapinya. Dalam hal ini akan menurunkan tingkat penderitaan, kerugian dan kekacauan akibat bencana (Sub-district et al., 2022). Kesiapsiagaan bencana

merupakan suatu kepentingan semua lembaga, masyarakat dan individu. Masing-masing komponen dalam stakeholder memiliki peranan yang berbeda dan harus dipadukan untuk dapat mencapai kesiapsiagaan secara menyeluruh (Sakdiah, 2019). Sedaangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menjelaskan bahwa, kesiapsiagaan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan guna mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

b) Tahap-tahap kesiapsiagaan bencana

Menurut (Ayub et al., 2019) ada 5 tahap kesiapsiagaan. Tahap *pertama*, penggalian informasi terhadap masyarakat, karena dalam penggalian informasi ini merupakan model awal pengembangan pengetahuan mengenai kesiapsiagaan. Tahap *kedua*, berdasarkan studi yang telah dianalisis, selanjutnya mendefinisikan pendekatan yang akan dikembangkan dengan merumuskan terlebih dahulu kemampuan dan tujuan khusus pendekatan yang ingin dicapai. Tahap *ketiga*, pada tahap ini tim melakukan penyusunan informasi berupa alat, dokumen serta pendukung untuk tahap implementasi pendekatan. Tahap *keempat*, pengimplementasian pendekatan dengan menggunakan pedoman yang telah di susun sebelumnya. Pada

tahap ini dapat diperoleh data evaluasi dan refleksi dari implementasi kebijakan yang dilakukan. tahap *kelima*, berdasarkan observasi yang telah dilakukan berulang, bisa ditarik kesimpulan untuk mencapai hasil dari struktur kebijakan. Tahap keenam, struktur kebijakan telah dihasilkan. Jika hasil dari kebijakan tersebut memungkinkan untuk dilakukan seterusnya, kebijakan tersebut bisa di jadikan pertimbangan untuk kedepannya tetapi jika tidak maka harus adanya kebijakan yang baru.

c) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana yaitu pertama, external motivasi yang meliputi berbagai kebijakan, pendidikan, pelatihan serta dana yang tersedia. Kedua, pengetahuan merupakan faktor utama serta kunci dari kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana baik kesiapsiagaan yang dimiliki oleh komunitas dan perorangan. Ketiga, sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang terhadap suatu objek tertentu tetapi tidak termasuk dengan tindakan serta aktivitas. Keempat, keahlian merupakan ketrampilan atau seseorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan (Susanti et al., 2014). Pengertian lain juga disampaikan oleh (Fabiana Meijon Fadul, 2019b) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat

tentang kesiapsiagaan bencana meliputi kurangnya pengetahuan yang dimiliki, usia, sosial budaya, suku/ras, dan status sosial. Maka dari itu diperlukan adanya pengetahuan tentang individu dan perbedaan kelompok resiko sehingga dapat digunakan untuk mengatur intervensi yang bertujuan untuk mendidik tentang risikodan mendorong perilaku efektif pengurangan risiko.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sebuah penjelasan secara abstrak suatu konsep dengan singkat dan jelas. Maka daripada itu definisi konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi pemerintah merupakan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Yang mana komunikasi pemerintah merupakan jalan untuk penyampaian ide, program serta gagasan pemerintah untuk masyarakat dalam aspek mencapai tujuan pemerintah.
2. Kesiapsiagaan bencana merupakan kegiatan serta langkah-langkah yang akan dilakukan sebelum terjadinya bahaya, agar dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya bencana tidak terlalu parah seperti sebelum melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan sebuah konsep mengenai bagaimana variabel diukur atau untuk menguji kesempurnaan,

yang mana definisi operasional bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variable penelitian, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Definisi operasional pada penelitian juga bisa dikatakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian. Definisi operasional yang akan digunakan pada penelitian ini adalah lima unsur komunikasi pemerintah yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana menurut Menurut Haddow dan Haddow (2008):

Tabel 1.2 Definisi Operasional

| Teori | Indikator | Variabel/Parameter |
|--|---|---|
| Komunikasi Bencana, menurut Haddow dan Haddow dalam (Tamitiadini et al., 2019) | 1) Fokus Pelanggan (<i>Costumer Focus</i>) | 1) Berkaitan dengan BPBD Bantul memahami informasi apa yang diperlukan oleh masyarakat |
| | 2) Komitment Kepemimpinan (<i>Leadership Commitment</i>) | 2) Berkaitan dengan tanggungjawab dan kewajiban pimpinan BPBD bantul dalam keterlibatannya pada pelaksanaan komunikasi yang efektif. |
| | 3) Proses komunikasi dan sistem perencanaan (<i>Inclusion Of Communication Is In Planning and Operations</i>) | 3) Berkaitan dengan keterlibatan anggota BPBD Bantul untuk ikut terlibat pada semua perencanaan dan operasi darurat komunikasi kesiapsiagaan bencana. |
| | 4) Kesadaran Lingkungan (<i>Situational Awarness</i>) | 4) Berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh BPBD Bantul harus sesuai dengan kejadian yang terjadi di wilayah tersebut. |

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| | 5) Media Kerjasama (Media Patnership) | 5) Berkaitan dengan penggunaan media sosial dalam penyampaian informasi |
|--|---------------------------------------|---|

Sumber: Diolah Peneliti Dari Berbagai Sumber, 2022

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam metode ini yaitu penelitian kualitatif menurut Sugiono (2020) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism atau enterpretif, dimana digunakan untuk meneliti kondisi alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Maka pada penelitian ini memilih jenis kualitatif karena digunakan untuk menjelaskan tujuan penelitian, selain itu jenis kualitatif juga memberikan fasilitas untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis dari masalah pada penelitian ini.

Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus. Hal ini dikarenakan pendekatan studi kasus memiliki keterkaitan dengan adanya masalah yang di teliti. Menurut Creswell (2014), studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam konteks komunikasi pemerintahan berbasis digital dalam upaya pencegahan bencana.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang Desain Komunikasi Pemerintahan Berbasis Digital dalam upaya Kesiapsiagaan Bencana akan dilaksanakan di kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul di Jetis, balpangan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55713. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan karena BPBD merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengatur dalam bidang penanggulangan bencana.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan penelitian ini berasal dari informasi pihak pertama serta data-data kepustakaan. Selain itu peneliti juga memanfaatkan big data yang tersedia di internet yang begitu kompleks. Sehingga penelitian ini mendapatkan data yang diperlukan secara lengkap untuk menjelaskan masalah penelitian. Adapun jenis data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber informasi langsung kepada pihak pertama. Oleh karena itu, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan masalah penelitian ini. Dalam hal ini berkaitan dengan komunikasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) berbasis digital dalam upaya pencegahan bencana di Kabupaten Bantul.

b) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari berita online seperti radar jogja, jogja tribunnews, kompas, petugas BPBD Kabupaten Bantul, website serta media sosial BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2019:455) dalam (Fabiana Meijon Fadul, 2019) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data ini diperoleh melalui beberapa sumber arsip dokumen pribadi, data

online, dokumen resmi buku dan jurnal. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti dan juga untuk mengetahui suatu hal dari responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan hasil wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, yang mana narasumbernya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Narasumber Wawancara dalam Penelitian

| No | Narasumber dan Jabatan | Tema Wawancara |
|----|---|--|
| 1. | Bambang Nugroho sebagai sub koordinasi pencegahan bencana | Komunikasi Pencegahan Bencana Kabupaten Bantul |
| 2. | Eta Nur Efendi sebagai Staff Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) | Data Kejadian Bencana Kabupaten Bantul |
| 3. | Anggota Kesiapsiagaan Bencana | Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Bantul |
| 4. | Anggota Pencegahan Bencana | Komunikasi Pencegahan Bencana Kabupaten Bantul |

| | | |
|----|-------------------|--|
| 5. | Anggota Pusdalops | Data Kejadian Bencana Kabupaten Bantul |
|----|-------------------|--|

Sumber: diolah penulis (2022)

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menganalisis buku, jurnal, arsip, baik dokumen tertulis maupun dokumen gambar dan elektronik berupa keterangan yang dapat mendukung atau relevan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi untuk mendapatkan data dari berita online, jurnal-jurnal yang relevan, media sosial dan website resmi yang berkaitan dengan komunikasi BPBD berbasis digital dalam upaya kesiapsiagaan bencana Kabupaten Bantul.

5. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data ini, data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi akan di proses dalam beberapa tahapan sebelum disajikan atau digunakan. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, dan Effendi (2020) terdapat empat tahapan dalam analisa data yakni pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis antar variabel dan verifikasi data, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan.

1) Pengumpulan dan pengolahan data

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dikelola sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemahaman BPBD Bantul dalam memahami informasi yang diperlukan oleh masyarakat, tanggungjawab pimpinan BPBD Bantul dalam kerlibatannya pada pelaksanaan komunikasi yang efektif, keterlibatan anggota BPBD Bantul pada semua perencanaan dan operasi darurat komunikasi kesiapsiagaan bencana, kesesuaian informasi yang disampaikan BPBD Bantul dengan kejadian yang terjadi dan penggunaan media sosial dalam penyampaian informasi. Data-data tersebut bersumber dari data primer dan data sekunder, yang selanjutnya data tersebut dibutuhkan untuk menganalisis masalah yang ada.

2) Seleksi data

Pada tahap seleksi data ini, data-data yang berkaitan dengan memahami informasi, tanggungjawab pimpinan, keterlibatan anggota, kesesuaian informasi dan penggunaan media sosial sudah tersusun sesuai kategori, maka selanjutnya akan dipilih dan dipilah kembali untuk mendapatkan data yang memang berguna dan sesuai dalam proses analisis.

3) Analisis antar variabel dan verifikasi data

Setelah seleksi data, langkah selanjutnya adalah menghubungkan antar satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator lainnya. Pada tahap ini, peneliti akan menghubungkan variabel yang berkaitan dengan memahami informasi, tanggungjawab pimpinan, keterlibatan anggota, kesesuaian informasi dan penggunaan media sosial dengan indikator pada teori komunikasi pemerintahan menurut Haddow dan Haddow dalam yang mana antar variabel dengan indikator harus sesuai.

4) Penafsiran dan penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti akan menafsirkan data yang telah didapat dari BPBD Bantul yang sudah sesuai dengan variabel/parameter penelitian untuk menjawab masalah yang ada. Selanjutnya, peneliti akan menarik kesimpulan dari jawaban yang telah disajikan.